

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada sektor pariwisata pada saat ini menjadi pokok pembangunan, dan pembangunan wisata menjadi konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dengan memastikan stabilitas lingkungan dalam pengelolaan pariwisata berorientasi jangka panjang, pembangunan pariwisata berkelanjutan lebih menekankan pada kepentingan wisatawan dan keterlibatan langsung masyarakat lokal.¹

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata merupakan aneka ragam atraksi wisata yang didorong bermacam barang dan jasa yang di jual oleh para pihak bersangkutan dalam mengelola tersebut. Dalam hal ini pariwisata menjadikan obyek wisata yang diharapkan berdaya saing untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pariwisata pada awalnya banyak dikerjakan oleh pemerintah, namun dengan seiring keperluan masyarakat kepada penyajian karena meningkatnya pariwisata dan sumber daya pemerintah yang terbatas, diyakini bahwa masyarakat dan sektor bisnis harus terlibat dalam mempromosikan pariwisata.²

Keterkaitan internal swasta dan masyarakat dalam pengelolaan aplikasi pariwisata adalah bagian dari konsep *collaborative governance* yang berbentuk

¹ Mutaqin, Ade Zaena, Pengembangan desa wisata dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Wisatahalimun. Co. Id, 2017

² Zaenuri, M, Tata kelola kolaboratif berbasis: tata kelola konsep, analisis, dan pemodelan. Yogyakarta: Jelajah, 2018

kolaborasi diantara *stakeholders* tersebut. Kolaborasi dengan mengaplikasikan paradigma visi bersama dan partisipasi, dengan cara untuk melaksanakan jalur koordinator dan kolaborasi pada bidang tata kelola pariwisata. Perlibatan pada pengelolaan pariwisata pihak swasta dan masyarakat juga merupakan penggunaan dari paradigma *new public governance* yang berkembang pada Ilmu Administrasi Publik. Model *governance* tersebut biasa digunakan sebagai alternatif upaya melaksanakan akselerasi.³

Sangat menarik untuk meneliti perkembangan terbaru yang dikenal sebagai tata kelola kolaboratif. Jenis baru proses tata kelola yang dikenal sebagai "*Collaborative Governance*" melibatkan penyatuan semua pihak terkait dalam proses yang berorientasi musyawarah dan konsensus dengan tujuan mengembangkan atau melaksanakan kebijakan serta program publik.⁴

Collaborative Governance bertujuan untuk mengamankan pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan yang memenuhi harapan pemangku kepentingan. Terdapat cara untuk menjawab permintaan para *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan mengatasi keterbatasan sumber daya yang tidak dapat memenuhi harapan masyarakat yang terus meningkat dalam kerja pemerintahan yang lebih baik sehingga *stakeholders* memiliki sumber daya ini.⁵

³ Chriss Ansell, Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*, 2007, hal. 543–571.

⁴ *Ibid.*

⁵ Yohari, Tomi, Analisis Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Raja Kabupaten Indragiri Hulu, Diss, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, hal. 2.

Dalam praktik pemerintahan modern, kolaborasi merupakan hal yang penting. Kolaborasi setiap organisasi atau lembaga dimotivasi oleh berbagai faktor. Munculnya *collaborative governance* bukanlah fenomena yang tiba-tiba, namun merupakan hasil dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai pihak luar yang mendorong kolaborasi dan koordinasi dalam upaya mengatasi masalah-masalah sosial. Kebijakan dan isu-isu publik merupakan fokus utama dari tata kelola kolaboratif.

Kota Tua Jakarta merupakan cikal bakal kota Jakarta dan salah satu cagar budaya, sebuah kawasan bersejarah yang memiliki nilai tinggi, Kota Tua Jakarta dipilih dalam program *Destination Management Organization*. Selain itu, Kota Tua dipilih untuk dimasukkan ke dalam Daftar 88 (Delapan Puluh Delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Destination Management Organization (DMO) yaitu sebuah program yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata, yaitu divisi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, bermaksud untuk membantu pertumbuhan pariwisata di lima belas tujuan yang dipilih. Program Organisasi Pengelola dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia PM.35/UM.001/MPEK/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengesahkan destinasi tersebut.⁶

⁶ Bhudiharty, Susy. Studi Komparatif: Penerapan Program Destination Management Organization (DMO) Kementerian Pariwisata Pada Destinasi Wisata Kota Tua Jakarta. Jurnal Industri Pariwisata 3.1, 2020.

Bagi pihak yang sempat menguasainya di masa lalu, seperti Kerajaan Sunda-Pajajaran, Kerajaan Tarumanegara, Kesultanan Banten-Jayakarta, dan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), Kota Tua Jakarta merupakan kota konflik yang menjadi simbol keagungan. Penguasa kolonial Hindia Belanda meninggalkan aset bangunan bersejarah di Wisata Kota Tua Jakarta, seperti ruang bawah tanah, kantor gubernur, pengadilan, dan bahkan gereja yang berfungsi sebagai fasilitas pemerintah saat itu. Kota Tua Jakarta telah menjelma menjadi wisata sejarah dengan mengubah bangunan kosong menjadi museum yang menyimpan kekayaan informasi penting tentang sejarah kota Jakarta.

Museum ini meliputi Museum Seni Rupa dan Keramik Indonesia, Museum Bank Mandiri, Museum Fatahillah, Museum Bank Indonesia, dan Museum Wayang. Kafe Batavia, Gedung Pos Indonesia, dan Gedung Kerta Niaga, juga termasuk dalam beberapa bangunan bersejarah yang bersebelahan dengan bangunan tersebut. Taman Fatahillah, sebuah ruang terbuka di tengah kawasan ini, sering digunakan sebagai lokasi acara budaya dan kesenian khas Indonesia.

Karena dekat dengan pusat pemerintahan dan beberapa sarana transportasi darat yang aktif, kawasan Kota Tua Jakarta sendiri cukup mendukung penduduk Jabodetabek menjadi pusat aktivitas dan pariwisata. Banyak kafe dan restoran di wilayah ini menyajikan berbagai macam makanan. Seiring dengan layanan lain yang kini mulai dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta, pilihan penginapan juga mudah didapat di wilayah ini.

Kawasan Kota Tua Jakarta mengalami revitalisasi fisik berkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, revitalisasi tersebut membuat Kota Tua semakin terhubung

dengan transportasi umum di Jakarta seperti, bus Transjakarta dan kereta api commuter line. Rencananya, ke depan juga bakal terintegrasi dengan transportasi umum seperti microtrans dan ke depannya adalah MRT. Selain itu, Kota Tua juga kini memberlakukan Kawasan Rendah Emisi atau Low Emission Zone (LEZ) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar Kawasan Kota Tua.

Revitalisasi dan pengembangan Kota Tua Jakarta telah dimulai sejak Ali Sadikin menjabat pada 1970. Pada 21 Oktober 1970, Ali Sadikin menerbitkan Keputusan Gubernur yang menyatakan bahwa daerah sekitar Taman Fatahillah akan dipugar di bawah pengawasan pemerintah daerah. Agenda revitalisasi Kota Tua semakin dimantapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 1972 yang menetapkan Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya.

Pada 1993, era Gubernur Soerjadi Soedirdja, Pemda DKI Jakarta kembali memulai program revitalisasi. Revitalisasi ini menasar kawasan sekitar 139 hektare di wilayah administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dua tahun kemudian, Kota Tua dikembangkan menjadi destinasi wisata. Terobosan dibuat dengan mengizinkan swasta mengomersialkan kawasan tersebut, tetapi dengan syarat tidak mengubah bentuk bangunan tua yang sudah berdiri.

Pada era Gubernur Joko Widodo, konsorsium Kota Tua dibentuk untuk mempercepat revitalisasi. Program revitalisasi secara resmi dimulai pada Maret 2014. Pada tahun yang sama, kawasan Kota Tua dipersiapkan untuk didaftarkan menjadi destinasi wisata warisan dunia yang diakui UNESCO. Pencalonan ini gagal pada 2018. Gubernur saat ini, Anies Baswedan melanjutkan upaya

revitalisasi Kota Tua dengan membenahi badan sungai dan jalur pedestrian bantaran Kali Besar.

Pemerintah DKI Jakarta berupaya terus membenahi Kota Tua agar menjadi destinasi wisata yang menarik perhatian internasional. Berbanding terbalik dengan revitalisasi non fisik yang belum sepenuhnya tercapai. Ada beberapa komunitas regional yang memainkan peran penting dan menentukan dalam pertumbuhan kota tua, dan ada komunitas lain yang kurang terlihat. Mereka juga membutuhkan revitalisasi non fisik karena sebagian operasionalnya berhubungan dengan *heritage tourism*. Kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta serta hasil observasi awal dengan anggota dari beberapa komunitas yang tidak mengetahui tujuan atau inisiatif UPK Kota Tua menjadi dasar penelitian ini, serta kurangnya dukungan revitalisasi non-fisik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan tidak ada jadwal resmi yang jelas untuk pengelolaan kawasan Kota Tua Jakarta. Perbaikan struktur sejarah, penambahan objek wisata baru, dan pemberdayaan masyarakat secara tidak langsung melalui pariwisata merupakan manfaat dari penguatan masyarakat lokal di kawasan ini.

Membangun dan memulihkan kepercayaan masyarakat pada kapasitas mereka untuk memanfaatkan budaya dan sumber daya mereka untuk berkembang menjadi tempat liburan yang memenuhi persyaratan penting, mempromosikan

hidup sehat, dan tumbuh secara berkelanjutan adalah apa yang disebut Arida sebagai pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata.⁷

Keadaan di atas menunjukkan bahwa partisipasi aktif dan kerjasama pemerintah dan non pemerintah diperlukan untuk mengelola industri pariwisata dengan baik, karena dalam tata kelola kolaboratif baik pemerintah maupun non pemerintah harus terlibat secara aktif agar industri pariwisata dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan. Dan potensi yang ada saat ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan masyarakat di luar kawasan, maka penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan tata cara untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata Kota Tua Jakarta.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kota Tua disebutkan bahwa pengembangan kawasan dimaksudkan untuk melestarikan karakter lingkungan dan nilai sejarah sekaligus mengubahnya menjadi kawasan cagar budaya bernilai ekonomi tinggi sebagai kawasan pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas menggunakan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kota Tua Jakarta” dalam penulisan ini peneliti menggali informasi mengenai proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat.

⁷ Arida, I. Nyoman Sukma. Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali. Jurnal Kawistara 4.2. 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kolaborasi yang diterapkan dalam pengelolaan Destinasi Wisata Kota Tua Jakarta?
2. Bagaimana dampak kolaborasi dalam pengelolaan Destinasi Wisata Kota Tua Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kolaborasi dalam pengelolaan Destinasi Wisata Kota Tua Jakarta
2. Untuk mengetahui dampak kolaborasi dalam pengelolaan Destinasi Wisata Kota Tua Jakarta

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Ilmu Administrasi Publik.

2. Secara Praktisi

1. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dan pemahaman yang luas serta memperoleh keuntungan dari pengembangan keterampilan yang terkait dengan strategi pengelolaan destinasi pariwisata.
2. Bagi Instansi terkait diharapkan dapat membantu sebagai masukan bagi pemerintah terkait pengelolaan destinasi wisata kota tua jakarta.
3. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi terkini dan dapat memberikan informasi tambahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui dan menjaga lingkungan sebagai tempat wisata di kota tua jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskriptif daftar isi karya tulis bab per bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari sub bab sebagai berikut : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sub-sub bagian yang merupakan gambaran dan hasil tinjauan *collaborative governance* dalam pengelolaan destinasi wisata kota tua jakarta.

BAB V : Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil tinjauan *collaborative governance* dalam pengelolaan destinasi wisata kota tua jakarta.

